



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KERETA API INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia, dipandang perlu penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang berupa sarana dan prasarana kereta api, persediaan, serta fasilitas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999, yang dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA.

**BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa sarana dan prasarana kereta api, persediaan, serta fasilitas yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Tahun Anggaran 1984/1985 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 1.835.263.418.218.00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 115

LAMPIRAN

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROAN) PT. KERETA API INDONESIA

No.	JUMLAH	NAMA ASET	SATUAN	NILAI ASET
1.		SARANA KERETA API		
		a. Lokomotif Diesel		
		1) Rehabilitasi Lok D. 301 di Balai Yasa Yogyakarta	28 unit	Rp. 30.686.565.068,00
		2) Lok Diesel CC.201 di Jakarta	20 unit	Rp. 53.480.000.000,00
		3) Modifikasi Lok Diesel BB.203 menjadi CC.201 di Balai Yasa Lahat	7 unit	Rp. 5.821.827.442,00
		4) Lok Diesel BB.204 di Balai Yasa Padang	7 unit	Rp. 52.796.790.000,00
		5) Rehabilitasi Lok BB. 204 di Balai Yasa Padang	9 unit	Rp. 45.870.750.459,00
		6) Lok Diesel CC.203 di Jakarta	27 unit	Rp. 88.731.715.106,00
		7) Rehabilitasi Lok Diesel BB.301 di Balai Yasa Yogyakarta	36 unit	Rp. 61.793.001.489,00
		8) Rehabilitasi Lok Diesel BB.303 di Balai Yasa Padang	4 unit	Rp. 3.378.852.109,00
		9) Rehabilitasi Lok Diesel BB.303 di Balai Yasa Pulubrayan	3 unit	Rp. 2.152.165.715,00
		10) Rehabilitasi Lok Diesel CC.201 di Balai Yasa Yogyakarta	5 unit	Rp. 4.250.483.150,00
		11) Rehabilitasi Lok Diesel CC.201 di Balai Yasa Lahat	4 unit	Rp. 3.270.348.000,00
		12) Rehabilitasi Lok Diesel BB.302 di Balai Yasa Pulubrayan	4 unit	Rp. 1.887.940.300,00

13) Rehabilitasi Traksi Motor di Balai Yasa Yogyakarta	3 unit	Rp. 135.039.000,00
14) Rehabilitasi Lok Diesel CC.202 di Balai Yasa Lahat	6 unit	Rp. 4.999.038.000,00
15) Traksi Motor Lok CC.202 di Jakarta	2 unit	Rp. 2.835.848.000,00
16) Rehabilitasi Lok Diesel BB.200 di Balai Yasa Lahat	1 unit	Rp. 889.000.000,00
17) Rehabilitasi Lok Diesel BB.304 di Balai Yasa Yogyakarta	3 unit	Rp. 2.493.763.734,00
18) Rehabilitasi Lok Diesel BB.202	3 unit	Rp. 1.457.842.444,00
Rehabilitasi Lok Diesel CC.202 di Balai Yasa Lahat	1 unit	

.....

JUMLAH 1.a

Rp.366.931.024.016,00

.....

b. Kereta Rel Listrik (KRL)

1) KRL di Jakarta	32 unit	Rp. 61.857.774.350,00
2) Perakitan KRL di PT INKA	100 unit	Rp.462.511.614.548,00
3) Rehabilitasi KRL di Balai Yasa Manggarai	24 unit	Rp. 10.226.568.027,00

.....

JUMLAH 1.b

Rp.534.595.956.925,00

.....

c. Kereta Rel Diesel (KRD)

- Rehab JRD di Balai Yasa Yogyakarta	64 unit	Rp.231.136.570.752,.00
--------------------------------------	---------	------------------------

.....

JUMLAH 1.c

Rp.231.136.570.752,00

.....

d. Kereta

1) Rehabilitasi Kereta K.3 di Balai Yasa Surabaya Gubeng	22 unit	Rp. 6.460.558.670,00
2) Bogie Kereta K.3 di	60 unit	Rp. 23.309.353.900,00

Jakarta

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 3) Rehabilitasi Kereta K.3
di Balai Yasa Manggarai | 165 unit | Rp. 7.021.257.385,00 |
| 4) Rehabilitasi Kereta K.3
di Balai Yasa Semarang | 81 unit | Rp. 2.879.238.512,00 |
| 5) Rehabilitasi Kereta K.3
- Forklift | 15 unit
1 unit | Rp. 1.272.817.234,00
Rp. 70.700.000,00 |
| 6) Rehabilitasi Kereta K.3
di Balai Yasa Lahat | 7 unit | Rp. 904.481.865,00 |
| 7) Rehabilitasi Kereta K.3
di Balai Yasa Pulubrayan | 2 unit | Rp. 160.000.000,00 |
| 8) Rehabilitasi Kereta K.3
di Balai Yasa Surabaya
Gubeng | 25 unit | Rp. 34.782.017.960,00 |
| 9) Kereta K.3 di Balai Yasa
Manggarai | 19 unit | Rp. 22.143.164.000,00 |
| 10) Rehabilitasi Kereta K.3
di PT INKA Madiun | 40 unit | Rp. 24.142.800.000,00 |
| 11) Kereta penumpang Argo
JS-950 (pengadaan dan
rehab) | 27 unit | Rp. 46.974.352.000,00 |

.....
JUMLAH 1.d

Rp.170.120.741.526,00
.....

d. Gerbong

- | | | |
|---|----------|-----------------------|
| 1) Gerbong dan suku cadang
nya di Sumatera Selatan | 265 unit | Rp. 22.662.739.336,00 |
| 2) Gerbong di Sumatera
Selatan | 80 unit | Rp. 9.670.019.658,00 |
| 3) Tambahan bogie untuk
Gerbong di Sumatera
Selatan | 32 unit | Rp. 13.448.257.000,00 |
| 4) Gerbong (eks bantuan
teknik Bank Dunia) | 30 unit | Rp. 6.451.818.840,00 |
| 5) Rehabilitasi Jasa
Konsultasi (gerbong) | 1 paket | Rp. 1.354.737.305,00 |
| 6) Gerbong di Jakarta | 30 unit | Rp. 7.628.255.200,00 |
| 7) Rehabilitasi gerbong di
Balai Yasa Tegal | 604 unit | Rp. 2.431.068.845,00 |
| 8) Rehabilitasi gerbong di
Balai Yasa Surabaya | 788 unit | Rp. 4.102.114.303,00 |

Gubeng		
9) Rehabilitasi gerbong di Balai Yasa Padang	21 unit	Rp. 672.956.590,00
10) Rehabilitasi gerbong di Balai Yasa Lahat	93 unit	Rp. 1.195.959.000,00
11) Rehabilitasi gerbong di Balai Yasa Pulubrayan	23 unit	Rp. 652.000.000,00

JUALAH 1.e Rp. 70.278.926.077,00

2. PRASARANA KERETA API

a. Gedung Dipo dan Balai Lahat	1 paket	Rp. 3.794.941.322,00
b. Gedung Stasiun Surabaya Pasar Turi	1 paket	Rp. 900.386.000,00
c. Gedung Stasiun Gambir, Gondangdia Kampung Bandan, Jayakarta, Cikini, Mangga Besar, Sawah Besar dan Juanda	1 paket	Rp.134.054.357.282,00
d. Gedung Balai Yasa Padang dan Dipo Padang Panjang	1 paket	Rp. 12.630.281.250,00
e. Gedung Stasiun Tanah Abang	1 paket	Rp. 54.911.838.238,00
f. Gedung Diklat Bekasi	1 paket	Rp. 2.429.554.200,00
g. Renovasi Dipo Lokomotif Semarang Poncol	1 paket	Rp. 1.035.158.309,00
h. Renovasi Dipo Lokomotif Bandung	1 paket	Rp. 1.376.125.500,00
i. Gedung Dinas KDT 13 Kertapati di Palembang	1 paket	Rp. 4.412.913.850,00
j. Gedung ex. KP.3BAKA	1 paket	Rp. 7.794.000.000,00
k. Investasi sarana (selisih biaya pemeliharaan prasarana 1993 dikurangi kompensasi Pemerintah)		Rp. 48.033.796.562,00

JUALAH
Rp.271.463.352.513,00

3. PERSEDIAAN

a. Suku Cadang Lok. CC.201/ BB.203	6 paket	Rp. 26.313.483.970,00
b. Suku Cadang Lok. BB.302/	1 paket	Rp. 13.867.583.070,00

BB.303/BB.306		
c. Suku Cadang Lok. BB.300/ BB.301/BB.304	2 paket	Rp. 12.864.478.654,00
d. Suku Cadang KR D	1 paket	Rp. 13.133.518.080,00
e. Suku Cadang Wesel	1 paket	Rp. 3.959.397.550,00
f. Suku Cadang Lok. CC.203	1 paket	Rp. 679.135.460,00
g. Suku Cadang Lok. BB.204	1 paket	Rp. 12.546.295.988,00
h. Suku Cadang Mesin Perawatan Jalan	1 paket	Rp. 27.453.816.051,00
i. Suku Cadang Sarana	2 paket	Rp. 2.023.327.750,00

.....
JUMLAH

Rp.122.841.036.573,00
.....

4. FASILITAS

a. Komputer beserta kelengkapan nya	1 paket	Rp. 5.591.526.280,00
b. Handing Trailler/Mini Bus, Head Truck		Rp. 811.316.000,00
- Trailler	4 unit	
- Head Truck	2 unit	
- Mini bus	5 unit	
c. Kendaraan bermotor untuk perawatan jembatan	2 unit	Rp. 2.721.600.000,00
d. Mesin Pembersih Permukaan	1 paket	Rp. 762.216.800,00

Baja

e. Electric Forklift H di Balai Yasa dan Terminal Peti Kemas Bandung	1 paket	Rp. 5.586.006.516,00
f. Mesin Perawatan Jalan	39 unit	Rp. 61.201.445.240,00
g. Mesin dan peralatan Balai Yasa Jembatan Kiaracondong	1 paket	Rp. 1.221.699.000,000

.....
JUMLAH 4

Rp.

77.895.809.836,00
.....
.....

JUMLAH (1+2+3+4)

Rp.1.835.263.418.218.00
.....

INDONESIA,

PRESIDEN

REPUBLIK

ttd

ABDURRAHMAN

WAHID